

# **INTEGRASI DAN SINKRONISASI PROGRAM SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

**Anis Maryuni Ardi**

*Jurnal SAGA vol 1 (Agustus 2023)*

## **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum dalam konteks demokrasi elektoral memegang peranan penting sebagai sarana untuk menentukan perwakilan dan arah kebijakan negara. Untuk memastikan pemilu yang partisipatif, penting untuk dilakukan sosialisasi pendidikan pemilih sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat dalam mengambil keputusan menggunakan hak konstitusionalnya secara cerdas.

Dalam era digital, media sosial telah muncul sebagai alat yang potensial untuk mendukung sosialisasi pendidikan pemilih. Media sosial membawa perubahan signifikan dalam cara orang berkomunikasi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam menentukan pilihan. Dengan populasi pengguna media sosial yang semakin meluas, sebagaimana mengutip dari Statista bahwa per September 2021, terdapat lebih dari 4,5 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube yang menjadi kanal populer bagi program sosialisasi dan pendidikan pemilih.<sup>1</sup>

Platform-platform ini memberikan kesempatan baru untuk menyajikan informasi politik dengan cara yang lebih menarik, mudah diakses, dan interaktif. Data menunjukkan bahwa penetrasi penggunaan media sosial cukup signifikan di berbagai kelompok usia. Misalnya, survei Pew Research Center pada 2020 menunjukkan bahwa 69% orang dewasa di Amerika Serikat menggunakan media sosial. Dari angka tersebut, 90% orang berusia 18-29 tahun, 82% berusia 30-49 tahun, 69% berusia 50-64 tahun, dan 40% berusia 65 tahun ke atas.<sup>2</sup>

Namun, dalam upaya mengoptimalkan media sosial dalam sosialisasi pendidikan pemilih, terdapat pula tantangan yang perlu diatasi. Informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu diverifikasi kebenarannya, sehingga masyarakat rentan terhadap penyebaran berita palsu (hoaks) atau informasi yang bias. Selain itu, potensi adanya polarisasi opini juga perlu diperhatikan, di mana masyarakat cenderung hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri.

Berkaca dari pengalaman pelaksanaan pemilu 2019, untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres 2019), Tingkat partisipasi nasional sekitar 81% sedangkan di Banten mencapai 83,7% dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Wilayah Khusus (Pileg 2019): Tingkat partisipasi: Sekitar 72% dan di Banten sekitar 82%.<sup>3</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat cenderung baik, sehingga program

---

<sup>1</sup> Statista per September 2021

<sup>2</sup> Pew Research Center pada 2020

<sup>3</sup> E-RPP KPU Provinsi Banten

sosialisasi pendidikan pemilih sebagai salah satu implementasi dari prinsip integrasi dan sinkronisasi di lingkungan sekretariat KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, serta KPU Kabupaten/Kota menjadi penting untuk digali agar mendapatkan pola yang akurat dan strategi yang valid dalam mengoptimalkan media sosial.

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 nanti akan menjadi momentum yang penting untuk menentukan arah demokrasi Indonesia ke depan, dimana digitalisasi yang massif disertai dengan peserta pemilu yang kompleks dan pemilih muda mendominasi sebesar 52%. Sehingga penting untuk dipetakan strategi optimalisasi sosialisasi pendidikan pemilih melalui media sosial yang terintegrasi dan sinkron dari mulai sekretariat KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, serta KPU Kabupaten/Kota.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

### **1. Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks):**

Media sosial sering menjadi platform yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu, hoaks, atau berita palsu. Informasi yang tidak diverifikasi dengan baik dapat dengan cepat menyebar di platform-platform ini, mengakibatkan masyarakat memperoleh pemahaman yang salah tentang isu-isu politik dan calon.

### **2. Polarisasi Opini:**

Media sosial dapat memperkuat polarisasi opini dan meningkatkan ketegangan dalam diskusi politik. Orang cenderung berkumpul dengan mereka yang memiliki pandangan serupa, dan platform ini dapat digunakan untuk memperkuat perpecahan dan konflik.

### **3. Aksesibilitas media sosial yang tidak merata pada segala golongan:**

Meskipun media sosial populer di kalangan generasi muda, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan platform ini. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakesetaraan dalam akses informasi politik dan pendidikan pemilih.

### **4. Sumber Daya Manusia yang kapabilitasnya tidak sama**

Pada prinsipnya Komisi Pemilihan Umum belum mempunyai sistem rekrutmen dan assessment yang definitif untuk konten kreator, editor, videografer, dan kualifikasi lainnya yang dapat menunjang sosialisasi pendidikan pemilih melalui media sosial.

### **5. Infrastruktur dan Sarana prasarana antar satuan kerja yang timpang**

Berangkat dari fakta bahwa jangkauan sinyal internet tidak sama kuatnya antar daerah kota dan pedalaman, pusat pemerintahan dan daerah lain, hal ini tentu akan mempengaruhi perilaku masyarakat berikut sarana sosialisasinya.

## **C. Metode Penulisan**

### **1. Pengumpulan Data dan Informasi**

Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari laporan kegiatan, laporan kinerja tahunan KPU, PPID, JDIH, dan media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

- i) Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan untuk penulis mengenai lingkup kegiatan dan konsep-konsep yang tercakup dalam penulisan
- ii) Untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, dimana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan.

### **2. Pengolahan Data dan Informasi**

Beberapa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data, kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder.

### **3. Analisis Data**

Dalam makalah ini penulis menggunakan dua analisis, yang pertama adalah Analisis Konten dimana analisis ini melibatkan pengkategorian dan penafsiran isi dari materi tertulis, seperti artikel, dokumen, atau posting media sosial. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tematik atau pandangan yang muncul dalam materi tertulis. Sedangkan untuk analisis yang kedua, penulis menggunakan analisis perbandingan, dengan jenis analisis ini penulis dapat melibatkan perbandingan antara satuan kerja atau kondisi yang berbeda dalam data yang dikumpulkan. Analisis perbandingan dapat membantu mengidentifikasi perbedaan signifikan antara variabel yang diamati.

#### **D. Sistematika Kepenulisan**

Dalam menyusun makalah ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke masalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan karya tulis dengan judul “Mengukuhkan Prinsip Integrasi dan Sinkronisasi dalam Program Sosialisasi Pendidikan Pemilih Melalui Optimalisasi Media Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Pendahuluan:

##### 1. Latar Belakang:

Pengenalan tentang pentingnya peran media sosial dalam proses demokrasi dan pemilu.

Permasalahan Penelitian: Penjelasan mengenai fokus penelitian, yaitu optimalisasi media sosial dalam sosialisasi pendidikan pemilih.

##### 2. Identifikasi Masalah:

i. Penyebaran Informasi Palsu (Hoaks):

ii. Polarisasi Opini

iii. Aksesibilitas media sosial yang tidak merata pada segala golongan

iv. Sumber Daya Manusia yang kapabilitasnya tidak sama

v. Infrastruktur dan sarana prasarana antar satuan kerja yang timpang

##### 3. Metodologi Penulisan

i. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka

ii. Pengolahan Data dan Informasi

Beberapa data dan informasi yang diperoleh pada tahap pengumpulan data, kemudian diolah dengan menggunakan suatu metode analisis deskriptif berdasarkan data sekunder.

iii. Analisis Data

Dalam makalah ini penulis menggunakan dua analisis, yang pertama adalah Analisis konten dan analisis perbandingan

##### 4. Pembahasan

Pengaruh Media Sosial dalam Proses Pemilu: Penjelasan mengenai peran media sosial sebagai alat komunikasi politik dan pengaruhnya terhadap proses pemilihan umum.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih: Pengenalan konsep sosialisasi pendidikan pemilih dan mengapa media sosial menjadi sarana yang potensial dalam pendidikan pemilih.

Potensi Positif Media Sosial dalam Pendidikan Pemilih: Diskusi tentang bagaimana media sosial dapat memfasilitasi akses informasi politik, dialog interaktif, dan partisipasi aktif. Tantangan dalam Optimalisasi Media Sosial: Identifikasi masalah seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi opini, dan kurangnya literasi digital.

Strategi Optimalisasi Media Sosial dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih: Konten Edukatif yang Menarik: Pembahasan mengenai jenis konten yang efektif dalam mendidik pemilih melalui media sosial. Pemilihan Platform yang Tepat: Penjelasan tentang platform media sosial yang cocok untuk berbagai kelompok pemilih. Kampanye Literasi Digital: Strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kredibilitas informasi dan deteksi hoaks.

Contoh Implementasi Pendidikan Pemilih melalui Media Sosial: Ilustrasi mengenai bagaimana beberapa organisasi atau kampanye menggunakan media sosial dalam pendidikan pemilih. Tantangan dan Solusi dalam Optimalisasi Media Sosial: Penanganan Hoaks dan Informasi Palsu: Strategi untuk mengatasi penyebaran informasi palsu di media sosial.

#### 4. Kesimpulan

Optimalisasi media sosial adalah bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai alat yang kuat dalam berbagai konteks, tetapi untuk mengambil manfaat penuh dari platform platform ini, diperlukan strategi yang baik dan pendekatan yang berfokus pada tujuan yang jelas. Berikut beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan: Optimalisasi media sosial membutuhkan penetapan tujuan yang jelas. Yaitu meningkatkan kesadaran sebagai pemilih yang cerdas, meningkatkan keterlibatan, atau menciptakan interaksi dengan pemilih, hal ini bisa dicapai dengan kesadaran untuk tetap pada jalur integrasi dari pusat menuju daerah. Namun demikian, dibutuhkan juga beberapa hal yaitu: Konten yang Berkualitas, Penargetan yang Tepat; Konsistensi; Analisis dan Koreksi; serta Interaksi dan Keterlibatan.

#### 5. Saran

KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten dan Kota perlu memberikan evaluasi dan tambahan anggaran, serta optimalisasi media melalui strategi yang inklusif.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Efek Media Sosial:

Teori ini fokus pada bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku, pandangan, dan emosi individu. Dalam pandangan McLuhan dipopulerkan "The medium is the message" (Media adalah pesan)<sup>4</sup> konteks optimalisasi media sosial, ini berarti memahami bagaimana konten yang dibagikan di platform media sosial dapat memengaruhi audiens. Dengan menerapkan teori ini, strategi optimalisasi harus mempertimbangkan dampak psikologis konten pada audiens, dengan menyesuaikan konten untuk membangkitkan respon yang diinginkan.

#### B. Teori Interaksi Simbolik:

Teori ini menekankan pentingnya simbol-simbol dan makna yang diberikan oleh individu dalam berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dalam optimalisasi media sosial, ini mengartikan memahami bagaimana audiens memberikan makna pada konten yang dibagikan. Dengan menggunakan teori interaksi simbolik, Anda dapat merancang konten yang memicu reaksi positif dan relevan dengan nilai-nilai pemilih.

Herbert Blumer adalah sosialis Amerika yang bekerja lebih lanjut pada teori interaksi simbolik. Ia mengambil dasar-dasar yang diletakkan oleh Mead dan Cooley dan mengembangkan teori lebih lanjut. Salah satu konsep utama yang dia tekankan adalah "interaksi simbolik." Blumer berpendapat bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka melalui proses interpretasi simbolik, di mana makna diberikan pada tindakan dan objek berdasarkan interaksi sosial.<sup>5</sup>

#### C. Konsep Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih<sup>6</sup>

Konsep "sosialisasi dan pendidikan pemilih" mengacu pada proses di mana individu belajar tentang sistem politik, pemilihan umum, dan keterlibatan politik secara keseluruhan melalui pendidikan dan pengalaman mereka. Tujuan dari sosialisasi pendidikan pemilih adalah untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang pentingnya partisipasi politik dan hak suara, serta memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan politik yang berinformasi.

Berikut beberapa poin yang terkait dengan konsep sosialisasi pendidikan pemilih:

##### 1. Pendidikan Politik:

Sosialisasi pendidikan pemilih melibatkan penyediaan pendidikan politik kepada warga negara, baik di lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, maupun melalui program-program pendidikan politik di luar lingkungan pendidikan formal. Ini bisa mencakup pembelajaran tentang struktur pemerintahan, proses pemilihan, fungsi lembaga politik, dan isu-isu kebijakan.

##### 2. Kesadaran Politik:

<sup>4</sup> "Understanding Media: The Extensions of Man" (Pemahaman Media: Perluasan Manusia) oleh Marshall McLuhan

<sup>5</sup> Interaksi simbolik, oleh Herbert Blumer Mead dan Cooley.

<sup>6</sup> Dikutip dari buku Tata Kelola Pemilu, KPU RI, Hal, 195

Melalui pendidikan pemilih, individu diajarkan untuk mengembangkan kesadaran politik, yaitu pemahaman tentang isu-isu politik yang relevan dan pemahaman tentang posisi dan pandangan berbagai kandidat atau partai politik.

3. Penanaman Nilai Partisipasi:

Sosialisasi pendidikan pemilih bertujuan untuk membentuk nilai-nilai partisipasi aktif dalam proses politik. Ini melibatkan pengajaran tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum, menjalankan tugas warga negara, dan memberikan suara.

- D. Integrasi dalam lembaga mengacu pada proses menggabungkan atau mengkoordinasikan berbagai elemen atau aspek yang ada dalam suatu lembaga atau organisasi agar bekerja secara sinergis dan efisien.<sup>7</sup> Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang koheren dan berfungsi dengan baik, di mana berbagai bagian atau unsur saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Integrasi dalam lembaga dapat merujuk pada beberapa aspek, termasuk: Integrasi Struktural; Integrasi Proses; Integrasi Teknologi; Integrasi Budaya; Integrasi Sumber Daya; Integrasi Komunikasi; dan Integrasi Tujuan.

## PEMBAHASAN

Pemilu sebagai sistem yang mengatur sirkulasi elite kepemimpinan, menjangkau semua aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya media sosial. Dalam konteks memilih pemimpin, pengaruh media sosial dalam proses pemilu: penjelasan mengenai peran media sosial sebagai alat komunikasi politik dan pengaruhnya terhadap proses pemilihan umum.

Strategi optimalisasi media sosial dalam sosialisasi pendidikan pemilih adalah sebagai berikut: konten edukatif yang menarik, Pembahasan mengenai jenis konten yang efektif dalam mendidik pemilih melalui media sosial. pemilihan platform yang tepat: Penjelasan tentang platform media sosial yang cocok untuk berbagai kelompok pemilih. Kampanye literasi digital, strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kredibilitas informasi dan deteksi hoaks.

Upaya untuk mengatasi polarisasi opini melibatkan pendekatan yang mempromosikan dialog terbuka, peningkatan literasi media, pemahaman yang lebih baik tentang pandangan yang berbeda, dan pencarian titik persamaan. Meskipun polarisasi opini memiliki dampak negatif, penting juga diingat bahwa perbedaan pendapat adalah bagian alami dari masyarakat yang demokratis dan dinamis. Penting bagi masyarakat untuk terus mencari jalan untuk berbicara dan bekerja sama meskipun adanya perbedaan.

Untuk mengatasi dampak negatif polarisasi opini, diperlukan kerja sama dan usaha bersama untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan untuk memahami bahwa keberagaman pandangan adalah suatu kenyataan.

Pada saat pemahaman saya hingga September 2021, jaringan internet telah menyebar luas di seluruh Indonesia. Namun, ada beberapa daerah terpencil atau pedalaman yang mungkin masih mengalami keterbatasan akses internet karena tantangan infrastruktur dan geografis.

Beberapa daerah yang mungkin masih menghadapi kendala akses internet di Indonesia antara lain:

Daerah Pedalaman: Beberapa daerah yang terletak di pedalaman, seperti di Papua dan Kalimantan bagian dalam, mungkin mengalami keterbatasan akses internet karena tantangan geografis dan infrastruktur. Daerah Pegunungan: Daerah pegunungan atau wilayah dengan medan sulit seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur mungkin memiliki kendala dalam membangun infrastruktur telekomunikasi. Pulau-Pulau Terpencil: Beberapa pulau terpencil atau terisolasi mungkin juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses internet karena akses fisik yang terbatas.

Kawasan Pesisir: Beberapa kawasan pesisir atau kepulauan mungkin memiliki keterbatasan dalam akses internet karena faktor geografis dan infrastruktur. Namun, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan akses internet di seluruh negeri melalui program-program seperti Palapa Ring, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional. Oleh karena itu, informasi tentang jangkauan akses internet dapat berubah seiring berjalannya waktu dan

---

<sup>7</sup> Petter Ducker dalam Konsep Manajemen Modern dalam Lembaga.

upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas di daerah-daerah terpencil. Jika Anda mencari informasi yang lebih akurat dan mutakhir tentang daerah yang mungkin masih memiliki keterbatasan akses internet, disarankan untuk menghubungi sumber-sumber terpercaya seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Sedangkan masalah yang lainnya, yaitu timpangan dalam infrastruktur dan sarana prasarana antar satuan kerja adalah situasi di mana beberapa satuan kerja atau departemen dalam suatu organisasi memiliki akses atau fasilitas yang lebih baik daripada yang lain. Ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam ketersediaan sumber daya dan fasilitas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efisiensi, produktivitas, dan kerjasama organisasi secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, manajemen organisasi perlu memastikan alokasi anggaran yang adil, merencanakan pengembangan infrastruktur berdasarkan kebutuhan nyata, dan memastikan bahwa prioritas dan sumber daya diatur secara efisien untuk semua satuan kerja. Kesetaraan dalam akses fasilitas dan infrastruktur dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Semua permasalahan tersebut bisa diatasi dengan berbagai macam pendekatan. Dalam konteks sarana-prasarana, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota melakukan assessment terkait kebutuhan anggaran, sumber daya dan kondisi sosial masyarakatnya untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Anggaran KPU berfungsi sebagai alat untuk mengelola sumber daya finansial yang dialokasikan untuk menjalankan berbagai kegiatan dan operasi KPU. Dengan anggaran yang tepat, KPU dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Anggaran membantu KPU dalam merencanakan dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama periode tertentu. Setiap program kerja akan dihubungkan dengan alokasi anggaran yang sesuai, sehingga memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Memeratakan sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi atau masyarakat melibatkan upaya untuk menciptakan kesetaraan dalam pengembangan, pemberdayaan, dan peluang bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, suku, agama, atau faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memeratakan SDM: Evaluasi Kesetaraan Saat Rekrutmen, Pembangunan Keterampilan dan Pendidikan, Membangun Budaya Inklusif.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Optimalisasi media sosial adalah bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai alat yang kuat dalam berbagai konteks, tetapi untuk mengambil manfaat penuh dari platform platform ini, diperlukan strategi yang baik dan pendekatan yang berfokus pada tujuan yang jelas. Berikut beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan: Optimalisasi media sosial membutuhkan penetapan tujuan yang jelas. Yaitu meningkatkan kesadaran sebagai pemilih yang cerdas, meningkatkan keterlibatan, atau menciptakan interaksi dengan pemilih, hal ini bisa dicapai dengan kesadaran untuk tetap pada jalur integrasi dari pusat menuju daerah. Namun demikian, dibutuhkan juga beberapa hal yaitu: Konten yang Berkualitas, Penargetan yang Tepat; Konsistensi; Analisis dan Koreksi; serta Interaksi dan Keterlibatan.

### **B. Saran**

KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten dan Kota perlu memberikan evaluasi dan tambahan anggaran, serta optimalisasi media melalui strategi yang inklusif. Mengedepankan integrasi antar satuan kerja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat membantu meningkatkan efisiensi, kualitas kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh KPU untuk mengedepankan integrasi antar satuan kerja:

1. Komunikasi Terbuka dan Jelas:  
Penting untuk memastikan bahwa komunikasi antar satuan kerja berjalan dengan lancar. Selalu ada saluran komunikasi yang terbuka dan jelas, sehingga setiap unit tahu apa yang dilakukan oleh yang lain.
2. Tujuan Bersama:  
Tentukan tujuan bersama yang dapat diartikulasikan oleh semua satuan kerja. Ini membantu dalam mengarahkan upaya semua pihak ke arah yang sama.
3. Koordinasi yang Terencana:  
Membangun mekanisme koordinasi yang terencana dan terstruktur adalah kunci. Hal ini dapat melibatkan pertemuan rutin, diskusi kelompok, dan alat kolaborasi seperti perangkat lunak manajemen tugas.
4. Kolaborasi pada Proyek dan Inisiatif:  
Identifikasi proyek atau inisiatif yang memerlukan kontribusi dari berbagai satuan kerja. Menggalakkan kolaborasi pada proyek-proyek ini dapat memperkuat ikatan antar tim.
5. Penyediaan Sumber Daya yang Dibutuhkan:  
Pastikan bahwa setiap satuan kerja memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tugas-tugasnya. Kurangnya sumber daya dapat menghambat kemampuan untuk berkontribusi dalam upaya integrasi.
6. Pemberian Otoritas dan Tanggung Jawab yang Jelas:  
Definisikan dengan jelas otoritas dan tanggung jawab setiap satuan kerja. Ini membantu menghindari tumpang tindih dan memudahkan pengambilan keputusan.
7. Membangun Tim Lintas Fungsi:  
Bentuk tim lintas fungsi yang terdiri dari anggota dari berbagai satuan kerja. Tim ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu unit.
8. Pelatihan dan Pengembangan Bersama:  
Berikan pelatihan dan pengembangan yang sama kepada semua anggota tim. Ini membantu dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk kolaborasi yang sukses.
9. Pemantauan dan Evaluasi Bersama:  
Lakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian tujuan bersama secara berkala. Ini membantu untuk menilai efektivitas integrasi dan membuat perubahan yang diperlukan.
10. Budaya Kerja Inklusif:  
Penting untuk menciptakan budaya kerja inklusif di mana semua anggota satuan kerja merasa didengar dan dihargai. Ini akan mendorong partisipasi aktif dalam upaya integrasi.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, KPU dapat membangun fondasi yang kuat untuk integrasi antar satuan kerja. Hal ini akan membantu meningkatkan kolaborasi, keterlibatan, dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. E-Rumah Pintar Pemilu Provinsi Banten
2. E-PPID KPU Provinsi Banten
3. Tata Kelola Pemilu, KPU RI, 2019
4. Smith, A. (2021). Social Media Use in 2021. Pew Research Center. Link
5. Li, C., & Bernoff, J. (2008). Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies. Harvard Business Press.
6. Qualman, E. (2019). Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business. Wiley.
7. Norris, P. (2014). Why Electoral Integrity Matters. Cambridge University Press.